

Soal Minyak Tanah

Ibrahim Hasyim

MINYAK tanah merupakan suatu masalah yang memang harus dibahas secara rasional. Masalah ini memang sensitif karena menyangkut kehidupan masyarakat luas.

SUDAH waktunya untuk diwacanakan, mengingat berbagai faktor Subsidi BBM menjadi meningkat sangat tajam karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Di antara jenis BBM yang terbesar subsidi per satuan isi adalah minyak tanah. Segala upaya untuk menekan subsidi BBM harus diberi tempat dan dibahas secara terbuka, apalagi minyak tanah digolongkan sebagai bahan kebutuhan pokok rakyat.

Kita belum memiliki data akurat yang terakhir tentang segmen pemakai minyak tanah, terutama di kota besar dan di desa, apakah itu untuk memasak dan penerangan, atau untuk rumah tangga dan industri.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) telah menjadi program utama pemerintah dalam rangka pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan ini pasti akan merubah/menggeser konsumsi BBM termasuk minyak tanah.

Minyak tanah dikonsumsi luas di masyarakat bawah dengan pengetahuan yang rendah mengenai jenis dan perilaku energi, sehingga sulit diharapkan masyarakat mampu untuk memiliki energi secara tepat, efisien, dan rasional dalam penggunaannya.

Perubahan pola konsumsi

Secara umum, minyak tanah pada awalnya digunakan untuk penerangan dan memasak, kemudian berkembang untuk pemanas dan bahan bakar. Atau semula hanya disekitar rumah tangga, tetapi kemudian mengalir ke sekitar industri dan transportasi. Sinyal lama penulis (*Kompas* 10 Februari 1982), bahwa konsumsi BBM akan mengarah kepada BBM bersubsidi telah terbukti dan telah pula mendorong industri-industri teknologi untuk memakai minyak ta-

nah. Kalau kita buka kembali penelitian Alan M Strout 1978 "The demand for kerosene in Indonesia" dan tulisan Hadi Susastro "Mencari pengganti minyak tanah sebagai unsur pemerataan" yang disampaikan pada Seminar Energi Nasional II-1981, maka pada waktu itu ada beberapa kesimpulan penting yang perlu kita cermati.

Bahwa minyak tanah secara politis telah dijadikan sebagai instrumen pemerataan pembangunan, sebagai kebijakan sosial dan karena itu minyak tanah dijadikan sebagai unsur dari bahan kebutuhan pokok masyarakat. Konsekuensi dari keputusan ini, telah terjadi penetrasi minyak tanah ke seluruh Tanah Air, ke desa, ke pulau-pulau kecil dan dengan ketersediaan dengan kemudahan memperoleh minyak tanah, maka masyarakat dan industri di pedesaan mulai menggantikan kayu bakar dan bahan bakar nonkonvensional lainnya dengan minyak tanah.

Adanya kecemasan yang berlebihan bahwa akan terjadi penggundulan hutan bilamana sebagian rakyat terus menggunakan kayu bakar, padahal menurut penelitian Howard Dick "The oil price subsidy deforestation and equity, 1980", mengatakan bahwa kecemasan itu tidak terbukti dan justru dalam jangka panjang akan terjadi komersialisasi kayu bakar, yang ikut membantu kenaikan pendapatan rakyat di pedesaan. Subsidi minyak tanah apabila dikaitkan dengan masalah penggundulan hutan merupakan instrumen yang bukan hanya tidak mengena pada sasaran, tetapi juga bersifat kontra produktif.

Melihat pada penggunaan minyak tanah dan kecenderungan konsumsinya, secara umum program pelistrikan desa cukup efektif mengganti minyak tanah karena 55 persen dari konsumsinya digunakan untuk penerangan. Pemberlakuan diferensiasi tarif listrik dan subsidi silang jauh lebih mudah dari diferensiasi harga minyak tanah. Sedangkan di kota, peran minyak tanah lebih mudah digantikan oleh alat listrik dan gas/LPG baik untuk memasak maupun penerangan.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana pola penggunaan dan kecenderungan konsumsi minyak tanah saat ini, tentu sudah banyak bergeser. Namun demikian, sayangnya belum ada data pen-

elitian seperti yang dilakukan pada akhir tahun 1970-an. Yang jelas konsumsi minyak tanah 2003 sudah mencapai 16,7 juta kl, dibandingkan dengan konsumsi tahun 1980 sebesar 7,8 juta kl, atau meningkat 214 persen.

Penelitian yang komprehensif sangatlah diperlukan untuk dapat memberi gambaran sesungguhnya apa yang telah terjadi di masyarakat dengan minyak tanah ini dan kemudian mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap sejumlah kebijakan yang masih berlaku sekarang. Masih tepatkah sebagai instrumen pemerataan, masih sesuaiakah sebagai unsur bahan pokok dan yang paling utama lagi adalah masih perlukah diberikan subsidi yang begitu besar itu.

Bagaimana keadaan sekarang tentulah sudah sangat berubah karena penetrasi minyak tanah sudah lebih merata, jaringan listrik semakin luas, penggunaan gas LPG tambah meningkat, serta perluasan pemakaian seri meluasnya pemakaian mesin-mesin kecil di rumah tangga, UKM, dan nelayan.

Perubahan di pergeseran konsumsi minyak tanah di rumah tangga, UKM, dan transportasi perlu disurvei kembali secara nasional, karena jangan sampai keliru dalam perumusan kebijakan subsidi maupun upaya operasional lainnya seperti sidak dan operasi pasar yang selama ini dilakukan dengan sangat melelahkan itu.

Survei nasional ini cukup mendesak untuk dilakukan mengingat data kebutuhan minyak tanah untuk masing-masing sektor perlu diketahui secara tepat karena angka ini sangat menentukan dalam hitung menghitung subsidi dan penetapan harga.

Perubahan paradigma

Pada waktu lalu harga minyak tanah bukanlah yang termurah. Penetapan harga BBM tanggal 22 Agustus 1965 memperlihatkan harga minyak tanah masih sama dengan harga minyak solar dan malahan lebih mahal dari minyak diesel maupun minyak bakar. Melalui belasan kali penetapan harga BBM baru, beda harga minyak tanah dengan minyak-milayah hitam tidaklah terlalu berbeda, tetapi setelah drama protes kenaikan BBM, Januari 1993/1994, barulah sejak saat itu minyak tanah selalu menjadi jenis BBM yang termurah dan sejak saat

itu pula menjadi jenis BBM yang sangat sensitif untuk dinalikkkan setiap kali pemerintah menaikkan harga BBM.

Dengan kebijakan harga seperti itu, sadar atau tidak, paradigma yang terbentuk seakan-akan minyak tanah sudah menjadi "hak" rakyat yang harus terus dipenuhi. Pendistribusiannya terus diperluas di kota, di daerah-daerah yang terisolasi, gunung-gunung hingga ke pulau-pulau terpencil, sehingga semakin sulit dikontrol, sehingga terjadilah pencampuran, pemakaian di sektor industri, sampai dengan diselundupkan.

Kebutuhan terus menaik, pengadaannya pun sebagian harus diimpor bukan lagi dalam bentuk kualitas minyak tanah, tetapi kualitas bahan bakar pesawat terbang, karena jenis itulah yang tersedia dan yang mendekati kualitas minyak tanah. Sedih sekali melihat kenyataan ini karena hanya negara kita yang harus membekali minyak tanah untuk dibakar secara terus-menerus di rumah tangga dan UKM, padahal untuk kebutuhan energi tersebut tersedia pilihan-pilihan energi yang bisa didorong pemanfaatannya.

Penulis juga sedih membaca kenyataan cangkang (batok) kelapa sawit yang dibuang percuma di perkebunan, kemudian dicari dan dikumpulkan oleh pengusaha untuk diekspor, karena di luar negeri diproses untuk mengganti briket batu bara sebagai bahan bakar. Dari Januari sampai September 2004 sudah 100.000 ton cangkang sawit diekspor melalui Pelabuhan Durenjaya saja. Penulis berkesempatan melihat langsung di Afrika Selatan bagaimana mantan Presiden Mandela pada pertengahan tahun 1990-an menyuplai listrik untuk keperluan memasak di rumah-rumah gubuk, jadi ini sangat paradoks dengan di Indonesia karena boleh jadi listrik lebih mahal dari minyak tanah dan hanya dipakai di rumah-rumah mewah.

Pedahal untuk keperluan rumah tangga tersedia beragam jenis energi, mulai dari kayu bakar, batu bara, minyak tanah, gas/LPG, dan listrik. Permasalahannya adalah bagaimana mendorong rumah tangga untuk memilihnya, apakah melalui kebijakan harga atau juga melalui edukasi langsung kepada masyarakat luas. Kalau minyak solar tidak tersedia dan mahal, bolehlah pengusaha bus ritub-hibut karena memang tidak ada alternatif



Antre Minyak Tanah — Seorang warga tengah mengikat jeriken kosong dalam antrean panjang menunggu datangnya truk tangki yang membawa minyak tanah di Kecamatan Bestang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pertengahan Mei 2004. Sejumlah warga kala itu mengeluhkan langkanya minyak tanah. Harga minyak tanah yang langsung dari truk tangki Rp 900/liter sedangkan harga di pasar atau kios Rp 1.300-Rp 1.500/liter.

bahan bakar lain yang tersedia, tetapi untuk rumah tangga mestinya tidak begitu, karena ada alternatif pilihannya. Paradigma minyak tanah seakan-akan satu-satunya energi yang bisa dipakai di rumah tangga sudah harus diubah. Mertinya unsur minyak tanah tidak dicanangkan lagi dalam sembilan bahan pokok dan harus digantikan dengan energi, sesuai yang tersedia di masing-masing lokasi. Di desa-desa yang kayunya melimpah bisa dipakai kayu bakar, di daerah yang ada batu bara bisa dipakai batu bara, begitu juga gas, LPG, dan listrik. Instrumen harga dan ketersediaan menjadi penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah mengedukasi masyarakat itu sendiri.

Penyuluh energi

Kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana memilih jenis energi dan bagaimana menghemat energi telah ber-

kembang pada masyarakat industri, akan tetapi pada masyarakat rumah tangga masih sangat minim. Publikasi-publikasi tentang hemat energi belum begitu efektif menuntun masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam hal memilih dan menghemat energi. Dalam hal ini bolehlah kita meniru cara kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diintrodusir di era Orde Baru yang telah menghantarkan Indonesia meraih swasembada beras. Peranan PPL sangat besar di dalam mengedukasi petani mulai dari mempersiapkan lahan, memilih bibit, merawat tanaman, panen, dan pascapanen. Untuk dapat memilih, menggunakan energi secara tepat dan efisien juga diperlukan pengetahuan tertentu karena tiap jenis energi mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri.

Di sinilah peran penyuluh energi di lapangan (PEL) sebagai ujung tombak yang dibutuhkan untuk mengedukasi

masyarakat, terlebih-lebih dengan akan semakin meningkatnya gerakan UKM dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Bisa dibayangkan betapa besar peningkatan kebutuhan energi yang perlu diarahkan secara tepat dan efisien, jangan sampai semuanya lari ke minyak tanah lagi. Bagaimana masyarakat yang ada di pedesaan, di perkebunan memulai kembali untuk menggunakan aneka ragam jenis energi yang pada tempo-dulu sangat luas dipakai seperti limbah pertanian (sabat/batok kelapa, serbuk gergaji, cangkang kelapa sawit, dll), limbah peternakan (bio massa, dll) daripada membakar minyak tanah yang semakin mahal dan semakin sulit diperoleh.

Peran penyuluh energi di sini sangatlah penting, dan tidak kalah pentingnya adanya penyuluh energi ini sekaligus juga menumbuhkan lapangan kerja baru.

IBRAHIM HASYIM
Pemerhati masalah energi